

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengertian pajak adalah “iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan peraturan Undang-Undang dan hasil yang didapat digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung”( Ishmi,2015). Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam Waluyo ( 2011: 12) antara lain perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif adalah hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan yang erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif adalah perlawanan aktif secara nyata terlihat pada usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, setiap perusahaan yang berdiri di Indonesia dan melakukan aktivitas di Indonesia merupakan wajib pajak yang dituntut untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kewajiban pajak yang harus di bayarkan adalah pajak penghasilan baik yang diterima atau yang diperoleh dari Indonesia maupun luar negeri dan dikenai berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk memotong dan juga memungut pajak. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat hambatan dimana masih banyak wajib

pajak berpendapat bahwa pajak merupakan beban yang harus masih ditekan.

Ada beberapa masalah yang timbul dalam perusahaan antara pihak principal dan agent. Masalah yang timbul akibat manajemen (agent), dimana manajemen berusaha meningkatkan keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan untuk peningkatan kejayaan dan juga dalam bentuk kesenangan dan fasilitas. Manajemen juga berusaha mengambil keuntungan dari beban yang ditanggung oleh pemegang saham (principal).

Pada umumnya perusahaan selalu ingin untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa dikurangi beban pajak terhutang. Dalam pelaksanaannya banyak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak terhutangnya antara lain perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Perencanaan pajak (*tax planning*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara yang *legal* sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah cara yang ilegal. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang merekayasa usaha transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi pajak agresif yang *legal* dengan memanfaatkan ketidak sempurnaan Undang-Undang Pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) memanipulasi secara *illegal* atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terhutang. Wajib pajak melakukan

penyelundupan atau pelanggaran pajak yang tidak diperkenankan oleh negara. Walaupun pada dasarnya *tax avoidance* dan *tax evasion* mempunyai sasaran yang sama yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi *tax evasion* merupakan *illegal* dalam usaha mengurangi beban pajak.

Perusahaan lebih memilih melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena *legal* yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan Undang-Undang Perpajakan. Di sisi lain, perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar (Scholes, *et al.* dalam Armstrong *et al.*, 2013) dan sumber pembiayaan yang tidak mahal (Armstrong *et al.*, 2012). Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan. Pemegang saham membutuhkan adanya penghindaran pajak dalam takaran yang tepat, tidak terlalu sedikit (mengurangi keuntungan), dan tidak terlalu banyak (risiko denda dan kehilangan reputasi) (Armstrong *et al.*, 2013).

Manajer sebagai agen memiliki kepentingan sendiri terhadap sumberdaya perusahaan. Keputusan penghindaran pajak perusahaan dibuat oleh manajer (Desai dan Dharmapala 2006), sehingga penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer

untuk bersikap oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek, tidak untuk keuntungan jangka panjang yang diharapkan oleh pemegang saham (Munick dan Noga 2010). Dengan mengejar keuntungan jangka pendek dapat berbahaya bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Di sinilah peranan tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat mengendalikan akibat dari masalah tersebut terhadap penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala 2006, *Amstrong et al, 2013*).

Mengingat pentingnya peran setiap individu dalam pembuatan keputusan mengenai kebijakan pajak perusahaan (Budiman dan Setiyono 2012), maka penelitiannya meneliti pengaruh dari latar belakang komite audit dan independen dewan komisaris terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya kepentingan antara pemegang saham dalam perusahaan tampaknya mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak (Timothy 2010). Peneliti meneliti Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya terkait dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Dyreng *et al.* (2010), Hormati (2009), dan Annisa (2012). Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2012) menguji apakah tata kelola perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. ) menguji pengaruh *corporate governance* yang baik terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa komite audit dan kualitas audit yang dijadikan proksi dalam *corporate governance* yang baik berpengaruh terhadap penghindaran

pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Variabel-variabel independen tersebut adalah karakter eksekutif, karakteristik perusahaan dan *corporate governance*. Dyreng *et al.* (2010) menguji pengaruh individu *Top Executive* terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dengan mengambil sampel 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di *ExecuComp* diperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Menurut Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Adapun mekanisme *corporate governance* menurut Hanum (2013) yaitu, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional.

Konservatisme memiliki kaidah pokok, yaitu: (1) tidak boleh mengantisipasi laba sebelum terjadi, tetapi harus mengakui kerugian yang sangat mungkin terjadi. (2) apabila dihadapkan pada dua atau lebih pilihan metode akuntansi, maka akuntan harus memilih metode yang paling tidak menguntungkan bagi perusahaan (Suharli, 2009). Konservatisme merupakan alasan yang dimiliki oleh seorang akuntan dan manajer untuk meninjau lebih detil dan lebih cermat untuk mengetahui laba dibandingkan rugi (Basu, 1997 dalam Prena 2012). Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat konservatisme dalam laporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen

manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya (Baharudin dan Wijayanti, 2011).

Prinsip konservatisme menyebabkan perusahaan secara tidak langsung dapat mempengaruhi ketepatan hasil laporan keuangan, dimana laporan keuangan yang disusun nantinya akan dijadikan pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan yang diambil manajemen berkaitan juga dengan hal perpajakan, khususnya dalam hal penghindaran pajak, karena penghindaran pajak biasanya dilakukan oleh perusahaan melalui kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja menurut (Budiman dan Setyon, 2012) dalam Tresno dan M. Yasser . Namun menurut penelitian Tresno dkk. (2012) dalam Nila dan Nawang (2016) dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang konservatif. Sehingga diduga, Perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan mendapatkan tingkat keagresifitasan pajak yang rendah.

Kiryanto dan Supriyanto (2006) mengatakan bahwa menilai laporan keuangan yang disusun berdasarkan metode yang konservatif akan cenderung bias karena tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Hal tersebut memunculkan keraguan tentang manfaat dari laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi yang konservatif. Paek et al (2007) dalam Wijaya 2012 menyebutkan

bahwa konservatisme akan menyebabkan terjadinya miss-matching di mana biaya masa depan di-matching-kan dengan pendapatan saat ini. Idealnya biaya yang terjadi pada periode ini akan di-matching-kan dengan pendapatan pada periode yang sama. Miss-matching tersebut akan menyebabkan understatement terhadap laba dalam periode ini yang dapat mengarahkan pada overstatement terhadap laba dalam periode-periode berikutnya yang disebabkan oleh understatement terhadap biaya pada periode tersebut

Fala (2007) dalam Lia (2011) menyatakan konservatisme bahwa penerapan akuntansi konservatif akan menghasilkan laba yang berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan untuk membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate. Lo (2005) dalam Lia (2011) menyatakan bahwa implikasi akuntansi konservatif pada perusahaan adalah penerapan secara konservatif standar akuntansi keuangan (SAK) yang tercermin dalam aktivitas operasional perusahaan di antaranya : (1) memperlambat pengakuan pendapatan, (2) mempercepat pengakuan beban, (3) merendahkan penilaian aktiva, dan (4) meninggikan penilaian utang. Hal tersebut akan menjadikan nilai aktiva bersih perusahaan menjadi rendah.

Penerapan akuntansi konservatif dilakukan dalam upaya memperkecil pajak penghasilan perusahaan. Perusahaan dapat memilih metode-metode yang cenderung konservatif dalam rangka menekan biaya pajak sepanjangdiperbolehkan oleh Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Di Indonesiaperaturan

perpajakan mewajibkan dilakukannya rekonsiliasi fiskal dengan tujuan mencocokkan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Ada peraturan yang diperbolehkan dalam standar akuntansi namun yang tidak diperbolehkan dalam

perpajakan, seperti biaya sumbangan yang tidak boleh dibebankan dan harus dikoreksi. Meskipun demikian aspek perpajakan tetap menjadi pertimbangan pilihan perusahaan untuk menerapkan akuntansi konservatif (watts, 2003)

Dalam penghindaran pajak karakteristik perusahaan juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan tindakan penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut biasanya dilihat dari jenis usaha, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas dan keputusan investasi (Surbakti, 2012). Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan asset, log size, dan sebagainya.. Menurut Rego (2003), semakin besar ukurannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Surbakti (2012) melakukan penelitian terkait pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.



Penelitian ini berusaha menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan pengukuran *effective tax rate* (ETR), komisar independen, komite audit, dan Kepemilikan institutional, *konservatisme akuntansi*, dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. Obyek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena perusahaan sektor pertanian dan pertambangan juga memiliki kontribusi pembayaran yang sedikit dibandingkan sektor yang lain. Tahun penelitian yang digunakan adalah 2011-2014.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan?
2. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tulisan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah mekanisme tata kelola mempengaruhi penghindaran pajak

2. Untuk menguji apakah konservatisme akuntansi mempengaruhi penghindaran pajak
3. Untuk menguji apakah karakteristik perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat akademik

- a. Menyediakan bukti empiris dan teoritis untuk arah penelitian berikutnya
- b. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini

Manfaat praktik

- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam perusahaan dalam mengaplikasikan variabel-variabel dalam penelitian untuk meningkatkan kinerja perusahaan
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak sehingga pemegang saham memberikan keputusan yang tepat untuk kebijakan membayar pajak

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB 1 :PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB 2 :TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, serta model penelitian.

### **BAB 3 :METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB 4 :ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, serta pembahasan.

### **BAB 5 :SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai simpulan, keterbatasan, dan saran